

Evaluasi Peran Bapenda dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo

Ebed Heluka^{1*}, Baharuddin², Agustinus³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: ebedhelukaebedheluka@gmail.com¹

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, terdiri atas pejabat BAPENDA dan wajib pajak, serta didukung data dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi peran kelembagaan, efektivitas strategi pengelolaan pajak, dan faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPENDA menjalankan peran instrumental, normatif, dan strategis melalui pembinaan, pengawasan, edukasi, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif. Namun, efektivitas strategi tersebut belum optimal akibat keterbatasan sosialisasi, kompleksitas administrasi, rendahnya literasi pajak, serta kendala geografis dan infrastruktur. Kepatuhan wajib pajak terbukti sangat dipengaruhi oleh kesadaran, kemudahan prosedur, transparansi pengelolaan pajak, dan kondisi ekonomi daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran kelembagaan BAPENDA, penyederhanaan layanan, dan perluasan edukasi pajak berbasis wilayah merupakan kunci peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi PAD di daerah berkembang.

Kata kunci: BAPENDA, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Yahukimo

Abstract

This study evaluates the role of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in enhancing taxpayer compliance to optimize Regional Original Revenue (PAD) in Yahukimo Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews with seven informants consisting of BAPENDA officials and taxpayers, supported by documentary analysis. The data were analyzed thematically to identify institutional roles, the effectiveness of tax management strategies, and factors influencing the contribution of local taxes to PAD.

The findings indicate that BAPENDA performs instrumental, normative, and strategic roles through taxpayer education, supervision, service digitalization, and incentive schemes. However, the effectiveness of these strategies remains limited due to insufficient socialization, complex administrative procedures, low tax literacy, and geographical as well as infrastructural constraints. Taxpayer compliance is strongly influenced by awareness, procedural simplicity, transparency in tax utilization, and local economic conditions. This study underscores that strengthening BAPENDA's institutional capacity, simplifying tax administration, and expanding region-based tax education are critical to improving taxpayer compliance and optimizing PAD in developing regions.

Keywords: BAPENDA, Taxpayer Compliance, Regional Original Revenue, Local Taxation, Yahukimo Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pilar utama kemandirian fiskal pemerintahan daerah di Indonesia (Paembonan et al., 2024). Namun, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD masih menunjukkan tingkat yang belum optimal secara nasional hal ini tercermin dari sejumlah studi empiris yang menyingkap bahwa kepatuhan wajib pajak lokal

sering berada pada level sub-optimal karena berbagai faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas administrasi, dan kualitas layanan publik yang belum merata (Yuliaratih et al., 2026).

Dalam konteks administrasi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki mandat untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui strategi normative, instrumental, dan strategis (misalnya digitalisasi layanan dan pembinaan wajib pajak), namun berbagai kendala masih

menghambat pencapaian target penerimaan pajak (Setiawati et al., 2025).

Fenomena ini diperkuat oleh data nasional yang menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dan kontribusi pajak tertentu terhadap PAD di berbagai daerah (misalnya ketidakstabilan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di kota-kota besar seperti Medan selama periode 2020–2024) (Kaban et al., 2025).

Tabel 1. Fenomena Empiris Penelitian

Indikator	Temuan	Sumber Penelitian
Kepatuhan wajib pajak lokal bersifat variatif dan sering belum mencapai target	Fluktuasi tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Medan	(Kaban et al., 2025)
Faktor non-ekonomi (mis. kualitas layanan, literasi) memengaruhi kepatuhan	Kepatuhan dipengaruhi oleh kualitas layanan, pelayanan publisitas, teknologi	(Yuliaratih et al., 2026)
Strategi peningkatan efektivitas pajak masih menghadapi hambatan	Peran BAPENDA belum optimal karena ceteknya sosialisasi dan layanan	(Setiawati et al., 2025)

Sumber: Penelitian terdahulu (2026)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga kelembagaan dan perilaku.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara potensi pendapatan yang dapat digali dari pajak daerah dan realisasi kontribusinya terhadap PAD akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan peran strategis BAPENDA. Memahami dinamika peran kelembagaan BAPENDA dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintahan lokal di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana peran BAPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Yahukimo?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak daerah?

3. Bagaimana efektivitas strategi pengelolaan pajak yang diterapkan BAPENDA terhadap optimalisasi PAD?

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Kepatuhan pajak merupakan konsep fundamental dalam administrasi perpajakan yang mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan kelembagaan (Devos, 2018).

Devos (2018) membedakan kepatuhan pajak ke dalam dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan administratif, seperti ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan kepatuhan material mencerminkan kesadaran internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Dalam konteks pajak daerah, kepatuhan material menjadi indikator penting karena mencerminkan keberlanjutan penerimaan pajak jangka panjang.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi (Alm & Torgler, 2019; Yuliaratih et al., 2024). Rendahnya literasi pajak dan kompleksitas prosedur administrasi sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya di daerah berkembang dengan keterbatasan infrastruktur dan akses informasi.

Peran Organisasi Publik dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Dalam perspektif administrasi publik, organisasi pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan pajak daerah. Robbins dan Judge (2020) menjelaskan bahwa organisasi publik menjalankan tiga peran utama, yaitu peran instrumental, peran normatif, dan peran strategis.

Peran instrumental merujuk pada fungsi teknis dan administratif organisasi dalam menjalankan mandat regulatif, seperti pemungutan pajak, pengelolaan data wajib pajak,

dan pelayanan administrasi. Peran normatif berkaitan dengan pembentukan nilai, norma, dan kesadaran publik, termasuk membangun budaya patuh pajak melalui edukasi dan sosialisasi. Sementara itu, peran strategis mencakup perencanaan kebijakan, inovasi pelayanan, serta pemetaan potensi pendapatan daerah.

Dalam konteks pajak daerah di Indonesia, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memegang peran sentral dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Penelitian Hasanah et al. (2025) dan Anjana dan Wirantari (2025) menunjukkan bahwa efektivitas peran BAPENDA sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kelemahan dalam salah satu aspek tersebut dapat menurunkan efektivitas pemungutan pajak dan berdampak pada rendahnya kontribusi pajak terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah menjadi komponen PAD yang paling berkelanjutan dibandingkan retribusi daerah, karena memiliki basis pemungutan yang lebih luas dan potensi jangka panjang (Mardiasmo, 2018).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di banyak daerah masih relatif rendah. Akib et al. (2023) menegaskan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah umumnya disebabkan oleh lemahnya basis data wajib pajak, rendahnya kepatuhan, serta keterbatasan pengawasan dan pelayanan. Asri (2025) menemukan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mendorong peningkatan PAD secara signifikan.

Regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, menegaskan pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Regulasi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, tetapi sekaligus menuntut kesiapan kelembagaan BAPENDA dalam aspek teknologi, SDM, dan tata kelola.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji optimalisasi PAD melalui pajak daerah. Lutfian dan Nurmantu (2025) menemukan bahwa fokus pada sektor pajak potensial dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Hasanah et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi peningkatan sosialisasi, pelayanan, dan penguatan regulasi daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek teknis pemungutan pajak, belum secara komprehensif mengevaluasi peran kelembagaan BAPENDA dari perspektif internal dan eksternal secara simultan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan mengevaluasi peran BAPENDA secara menyeluruh—instrumental, normatif, dan strategis—serta mengaitkannya langsung dengan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi PAD dalam konteks daerah berkembang seperti Kabupaten Yahukimo.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi proses, persepsi, dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena empiris secara sistematis dan kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan pajak daerah di Kabupaten Yahukimo, termasuk aparatur BAPENDA serta wajib pajak daerah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi, kompetensi, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Informan penelitian berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima pejabat BAPENDA Kabupaten Yahukimo dan dua wajib

pajak daerah. Pejabat BAPENDA dipilih karena memiliki peran strategis dan operasional dalam perencanaan, pengawasan, serta pelayanan pajak daerah, sementara wajib pajak dipilih untuk memperoleh perspektif eksternal terkait kepatuhan, kemudahan prosedur, dan kualitas layanan perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai lokasi utama pengelolaan pajak daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi kelembagaan dan karakteristik wilayah Yahukimo yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan data, akses informan, serta kesesuaian waktu dengan siklus evaluasi kinerja penerimaan pajak daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai peran BAPENDA, strategi pengelolaan pajak, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan realisasi PAD, regulasi daerah, dan dokumen kebijakan yang relevan guna memperkuat validitas data empiris (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif tematik, yang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara ditranskripsikan, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi pola makna, hubungan antar konsep, serta dinamika peran kelembagaan dalam konteks sosial dan kebijakan publik (Braun & Clarke, 2021). Proses analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan konsistensi, kedalaman interpretasi, dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang terdiri atas pejabat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan wajib pajak daerah di Kabupaten Yahukimo. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kewajiban

pajak daerah. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Kategori Responden	Jabatan/Status	Lama Keterlibatan
1	Pejabat BAPENDA	Kepala Bidang	> 10 tahun
2	Pejabat BAPENDA	Kepala Seksi	6–10 tahun
3	Pejabat BAPENDA	Staf Teknis	3–5 tahun
4	Pejabat BAPENDA	Staf Teknis	< 3 tahun
5	Pejabat BAPENDA	Staf Administrasi	3–5 tahun
6	Wajib Pajak	Pelaku Usaha	> 5 tahun
7	Wajib Pajak	Wajib Pajak Individu	3–5 tahun

Sumber: Data primer penelitian (2026)

Komposisi responden ini memberikan perspektif yang seimbang antara sudut pandang internal kelembagaan dan pengalaman eksternal wajib pajak, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap peran BAPENDA dan kepatuhan pajak daerah.

Ringkasan Hasil Wawancara

Wawancara mendalam menghasilkan berbagai temuan empiris terkait peran BAPENDA, strategi peningkatan kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam optimalisasi PAD. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Informan

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama
Peran BAPENDA	Melaksanakan pemungutan pajak, pendataan wajib pajak, sosialisasi, dan pengawasan
Strategi Kepatuhan	Edukasi pajak, digitalisasi layanan, dan pendekatan persuasif
Tingkat Kepatuhan	Masih relatif rendah dan fluktuatif
Kendala Utama	Rendahnya literasi pajak, keterbatasan SDM, infrastruktur, dan akses geografis
Persepsi Wajib Pajak	Prosedur pajak dianggap rumit dan manfaat pajak belum dirasakan langsung

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama
Dampak terhadap PAD	Kontribusi pajak daerah belum optimal

Sumber: Data primer diolah (2026)

Ringkasan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi yang dirancang BAPENDA dan efektivitas implementasinya di lapangan.

Analisis Tematik

Berdasarkan proses pengkodean dan pengelompokan data, diperoleh beberapa tema utama yang merepresentasikan dinamika peran BAPENDA dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis tematik disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Analisis Tematik Penelitian

Tema Utama	Subtema	Makna Tematik
Peran Kelembagaan BAPENDA	Instrumental	Pelaksanaan teknis pemungutan dan administrasi pajak
	Normatif	Pembentukan kesadaran dan budaya patuh pajak
	Strategis	Perencanaan kebijakan dan inovasi layanan
Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap pajak
	Kemudahan Prosedur	Akses dan kesederhanaan layanan
	Transparansi	Kejelasan penggunaan pajak oleh pemerintah
Kendala Optimalisasi PAD	Internal	Keterbatasan SDM dan sistem informasi
	Eksternal	Kondisi geografis dan ekonomi daerah

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tema-tema ini menjadi dasar interpretasi hasil penelitian dan penghubung antara temuan empiris dengan teori yang relevan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Yahukimo telah menjalankan peran instrumental, normatif, dan strategis dalam upaya meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Peran instrumental diwujudkan melalui pemungutan dan administrasi pajak daerah, sementara peran normatif terlihat dalam upaya sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa organisasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk kesadaran sosial (Robbins & Judge, 2020).

Namun demikian, efektivitas peran tersebut belum optimal. Rendahnya literasi pajak, kompleksitas prosedur, serta keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis menjadi faktor dominan yang menghambat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menguatkan temuan Alm dan Torgler (2019) serta Yuliaratih et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran, kemudahan layanan, dan persepsi keadilan dibandingkan pendekatan koersif semata.

Dari sisi wajib pajak, persepsi bahwa manfaat pajak belum dirasakan secara langsung turut menurunkan motivasi kepatuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah sebagai instrumen peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis BAPENDA, tetapi juga pada penguatan peran strategis dan normatif yang berorientasi pada pelayanan, edukasi, dan transparansi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD di Kabupaten Yahukimo memerlukan pendekatan kelembagaan yang komprehensif, integratif, dan kontekstual, yang menggabungkan penguatan peran BAPENDA, penyederhanaan prosedur pajak, serta peningkatan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPENDA telah menjalankan peran kelembagaan yang mencakup peran instrumental, normatif, dan strategis melalui pemungutan pajak, sosialisasi, pembinaan, serta upaya inovasi layanan perpajakan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan literasi pajak, kemudahan prosedur administrasi, transparansi pengelolaan pajak, serta kondisi ekonomi dan geografis daerah. Faktor-faktor tersebut membentuk persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pajak dan berdampak langsung pada keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

Dari sisi praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan administratif dan penegakan regulasi. Penguatan peran normatif dan strategis BAPENDA melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta perluasan edukasi pajak yang kontekstual menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dan keuangan daerah dengan menegaskan bahwa kepatuhan pajak daerah merupakan hasil interaksi antara kapasitas kelembagaan, perilaku wajib pajak, dan konteks sosial-ekonomi wilayah. Temuan ini menguatkan teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan kelembagaan dibandingkan pendekatan koersif semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas dan fokus pada satu wilayah penelitian, sehingga generalisasi temuan masih bersifat kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta memasukkan variabel tambahan seperti kualitas tata kelola, tingkat digitalisasi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J., & Torgler, B. (2019). *Do ethics matter? Tax compliance and morality*. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>

- Asri, M. (2025). Digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah dan implikasinya terhadap peningkatan PAD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 45–58.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Devos, K. (2018). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hasanah, U., Pratama, A., & Wibowo, R. (2025). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–46.
- Kaban, Y. M., Junawan, J., & Susilawaty, T. E. (2025). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3691–3698. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2189>
- Lutfian, A., & Nurmantu, S. (2025). Optimalisasi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 101–114.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). ANDI.
- Muryani, S., Hidayat, R., & Fitria, N. (2025). Peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. *Journal of Local Government Management*, 6(1), 21–34.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yuliaratih, K. A. S., Martini, I. A. O., & Maradona, A. F. (2026). Explaining Local Tax Compliance through Behavioral and Institutional Perspectives: The Role of Quality Interaction and Adaptive Governance. *JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4539>
- Yohana, M., Situmorang, D., & Siregar, H. (2025). Analisis kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional dan Keuangan*, 7(1), 55–68.